

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi yaitu berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan. Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, metodologi untuk membuat sesuatu (sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁸ Optimalisasi adalah proses dalam mencari solusi terbaik, tidak selalu dalam hal keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa saja ditekan jika tujuan dari pengoptimalan adalah meminimumkan.⁹

Adapun tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.¹⁰

⁸ <http://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.40

⁹ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 4

¹⁰ Krisna Amelia Yuniar, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 17

1. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi yakni dapat berbentuk maksimisasi atau minimisasi.

Maksimisasi dapat digunakan apabila tujuan dari optimalisasi berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimisasi digunakan untuk tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tersebut tentu harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan.

2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai sebuah tujuan. Alternatif keputusan tersedia yang menggunakan alternatif sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan..

3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya yakni merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Optimalisasi ini sangat diperlukan dalam berbagai aktifitas. Terlebih lagi optimalisasi yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja pada masyarakat. Salah satu bentuk dari pengoptimalisasian yakni dalam hal

penyerapan tenaga kerja, antara lain dengan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari sumberdaya manusianya, pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, ketrampilan pendukung lainnya, pengkajian potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja.¹¹

Peningkatan dalam kualitas dan produktifitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi, peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi pelatihan kerja melalui pembinaan dan pemberdayaan lembaga penelitian kerja serta perumusan nilai dan budaya produktif, pengembangan sistem dan metode peningkatan produktivitas serta pengembangan kader dan tenaga ahli produktifitas.¹² Tujuan dan manfaat dari adanya suatu pengoptimalan adalah untuk mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi merupakan suatu proses atau cara yang digunakan untuk pembuatan sistem atau keputusan yang menjadi lebih efektif baik memaksimumkan atau meminimalkan, yang disesuaikan dengan kriteria dan tujuan tertentu.

¹¹ Krisna Amelia Yuniar, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung...*, hal. 17

¹² Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 111

B. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Di dalam UU 13 Tahun 2003, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹³ Tenaga kerja adalah bagian dari integral dalam setiap sistem produksi, apakah distransformasi secara manual atau dengan mesin sangat otomatis. Keberhasilan suatu perusahaan bukanlah semata-mata tergantung pada efisiensi mesin-mesin dan peralatan. Tetapi banyak tergantung pada efisiensi tenaga kerja. Oleh sebab itu manajer harus memahami cara tenaga kerja bekerja.¹⁴

Menurut sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.¹⁵ Tenaga kerja mencakup segala bentuk kerja manusia yang diarahkan untuk mencapai hasil produksi, baik berwujud jasa, fisik maupun mental. Tenaga kerja itu sendiri meliputi buruh maupun manajerial. Karakter terpenting yang harus di ingat dalam tenaga kerja selain faktor produksi adalah karena mereka manusia, sehingga isu-isu kemanusiaan harus selalu tetap diperhatikan. Beberapa isu penting ini misalnya: bagaimana hubungan antara tenaga

¹³ <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/tk/UU13-2003Ketenagakerjaan.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2019 pukul 08.35

¹⁴ M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hal. 189

¹⁵ Badan Pusat Statistik Nasional, (<https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>) diakses pada tanggal 15 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

kerja dengan faktor produksi lain, bagaimana memberi ‘harga’ atas tenaga kerja, serta bagaimana menghargai unsur-unsur keadilan, kejiwaan, moralitas dan unsur-unsur kemanusiaan lain dari tenaga kerja.¹⁶

Tenaga kerja dapat dibagi berdasarkan beberapa golongan, yaitu¹⁷:

a. Tenaga kerja jasmani

Merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaganya dalam bekerja.

b. Tenaga kerja rohani

Merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan pikirannya dalam bekerja.

2. Pencari Kerja

Menurut Bambang Widjanjanta dkk, pengertian Pencari kerja adalah seseorang yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan, dan belum tentu siap untuk bekerja. Pencari kerja ini berkaitan dengan istilah tenaga kerja.¹⁸ Tenaga kerja merupakan seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja.¹⁹ Banyaknya pencari kerja yang ada saat ini disebabkan adanya jumlah penduduk yang melebihi kapasitas atau tidak ada keseimbangan antara

¹⁶ Siska Ratna Sari, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm)*, (Studi Kasus Konveksi M-Yege Collection Desa Kuanyar Jepara), (Kudus: skripsi tidak diterbitkan, 2016), hal. 9-10

¹⁷ Sayidatul Hikmah, *Pengaruh Modal Usaha Dan Tenaga Kerja Terhadap Hasil Produksi Batu Bata Merah Di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung: skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal. 44

¹⁸ Bambang Widjanjanta dkk, *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: CV Citra Praya, 2010), Hal. 12

¹⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 22:50

lapangan pekerjaan yang ada. Hal tersebut menjadi permasalahan yang cukup rumit di negara ini.

Dapat dikatakan bahwa tenaga kerja ini berkaitan dengan bertambahnya penduduk yang bisa diikuti dengan tingkat kemiskinan. Meskipun korelasi-korelasi statistik agregat antara ukuran kemiskinan dan pertambahan penduduk pada tingkat nasional tidak begitu jelas, namun pada tingkat individu atau rumah tangga cukup jelas. Semakin banyak penambahan penduduk sebenarnya akan menyebabkan permasalahan dalam perekonomian.

Hal ini disebabkan dengan meningkatnya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah beban maupun tanggungan dari si pekerja terhadap orang-orang yang belum atau sudah tidak lagi produktif dalam bekerja. Logikanya semakin banyaknya jumlah tanggungan maka biaya yang mereka keluarkan juga semakin banyak, kesempatan untuk investasi/tabungan yang akan membantu perekonomian justru terpaksa akan mengecil.

Berbeda dari sisi yang lain, negara dalam membangun negara dimana angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah, sedangkan penduduk usia kerja yang tidak mencari dan tidak bersedia bekerja dianggap tidak menganggur dan tidak masuk angkatan kerja hal tersebut berlaku pula pada ibu rumah tangga. Konsep tenaga kerja yang seperti itu menjadikan penduduk usia

kerja hanya sebagai konsumen yang tidak produktif yang berarti menjadi beban untuk angkatan kerja yang produktif.

Adapun Kebijakan-kebijakan dalam pembangunan berskala luas dan berjangka panjang sangat penting untuk menstabilkan jumlah penduduk, namun negara-negara berkembang juga harus memberikan perhatian kepada sejumlah keijakan spesifik dalam rangka menurunkan tingkat kelahiran dalam jangka pendek. Pada dasarnya pemerintah dapat mencoba untuk “mengendalikan” tingkat kemampuan berproduksi yang sebenarnya oleh penduduk (fertilisasi) dengan melalui lima cara pokok²⁰:

- 1) Mempengaruhi masyarakat agar memilih pola keluarga kecil
- 2) Melancarkan progam keluarga berencana dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai
- 3) Manipulasi insentif dan disinsentif
- 4) Memaksa masyarakat yang dengan secara langsung untuk tidak memiliki banyak anak dengan menerbitkan Undang-Undang
- 5) Menaikkan status sosial dan ekonomi wanita

Menurut Thohir Luth, pencari kerja dalam islam diartikan sebagai seseorang yang ingin bekerja secara sungguh-sungguhnya sepenuh hati dan jujur, mencari rizki dengan cara yang halal.²¹ Di dalam Islam bekerja merupakan sebuah kewajiban. Kerja dalam kaitannya dengan ekonomi berarti sebuah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi

²⁰ Michael P Todaro dan Stephen C, Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (T.T. P: Erlangga, 2006), hal. 354

²¹ Thohir Luth, *Antara Perut & Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 40

kebutuhan hidup. Dalam sistem perekonomian Islam, kerja dapat diartikan sebagai peneguhan eksistensi kekhalifahan, kewajiban, ibadah dan perjuangan (ijtihad).²²

Berkaian dengan ketenagakerjaan, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin.²³ Allah SWT memberikan batasan-batasan tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku yang ditetapkan dalam hukum Allah harus diawasi oleh seluruh masyarakat berdasarkan aturan Islam. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat.

3. Perencanaan Tenaga Kerja

Perencanaan tenaga kerja terdiri dari dua suku kata, yaitu perencanaan dan tenaga kerja. Perencanaan adalah proses untuk memutuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai selama periode mendatang dan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan agar mencapai tujuan tersebut. Tenaga kerja adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi yang mempunyai potensi, baik dalam wujud potensi nyata fisik maupun psikis, sebagai penggerak utama dalam mewujudkan eksistensi dan tujuan

²² Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 33

²³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

organisasi. Tenaga kerja disebut juga sebagai sumber daya manusia, personil pekerja, pegawai, atau karyawan.²⁴

Adapun alasan perusahaan harus melakukan perencanaan tenaga kerja, antara lain sebagai berikut:

- a) Perencanaan mengaitkan antara tindakan dan konsekuensinya

Tanpa perencanaan, perusahaan tidak akan dapat memberikan penilaian tentang apakah perusahaan tersebut tengah berada di jalur yang benar

- b) Perencanaan mendaya gunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.

Perencanaan tenaga kerja harus dilakukan sebelum melakukan aktifitas manajemen sumber daya manusia lainnya. Manajer akan dapat menjadwalkan perekrutan jika ia telah lebih dahulu mengetahui jumlah orang yang dibutuhkan

- c) Perencanaan mengaitkan sumber daya manusia dengan organisasi

Perusahaan mempunyai tujuan- tujuan seperti pangsa pasar, pemangkasan biaya, menciptakan inovasi, reputasi, dan layanan berkualitas tinggi

- d) Perencanaan meningkatkan keputusan kerja karyawan dan mendorong karyawan untuk terus berkembang

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan sistem perencanaan tenaga kerja yang baik akan mempunyai kesempatan

²⁴ Meldona & Siswanto, Perencanaan Tenaga Kerja,... hal. 3-4

yang lebih bagus untuk berpartisipasi dalam mengatur karir dan mengikuti pelatihan dan pengembangan karyawan.

Dalam proses penyerapan tenaga kerja atau rekrutmen dimulai pada waktu diambil langkah mencari pelamar dan berakhir ketika para pelamar mengajukan lamarannya. Artinya, secara konseptual dapat dikatakan bahwa langkah yang segera mengikuti proses rekrutmen yaitu seleksi, bukan lagi bagian dari rekrutmen. Jika proses rekrutmen ditempuh dengan tepat dan baik, hasilnya yaitu adanya sekelompok pelamar yang kemudian diseleksi guna menjamin bahwa hanya yang paling memenuhi semua persyaratan yang diterima sebagai pekerja dalam organisasi yang memerlukannya.²⁵

Oleh karena itu dalam penyerapan tenaga kerja secara kategorikal bahwa tidak ada satupun organisasi yang boleh mengabaikan apa yang terjadi disekitar lingkungannya artinya dalam mengelola organisasi, faktor-faktor eksternal dan lingkungan harus selalu mendapatkan perhatian, juga dalam hal merekrut tenaga kerja baru.²⁶ Beberapa contoh dari faktor-faktor eksternal yang perlu diperhitungkan dalam proses rekrutmen adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat pengangguran.
- b) Langka tidaknya keahlian atau ketrampilan tertentu.
- c) Proyeksi angkatan kerja pada umumnya.

²⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015), hal. 102

²⁶ *Ibid.*, 108-110

- d) Praktek rekrutmen oleh organisasi- organisasi lainnya.
- e) Kendala terakhir yang perlu dipertimbangkan oleh para pencari kerja ialah tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru itu.

Adapun yang perlu di perhatikan dalam menemukan tenaga kerja atau rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan, tentunya harus melewati berbagai pertimbangan salah satunya yaitu masalah sumber daya manusia iu sendiri. Untuk mengetahui sumber daya manusia yang baik dapat diterangkan dalam pengertian. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi- segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawai. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM, dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia.²⁷

Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat- alat kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan (Sumber Daya Manusia) yang mengelola faktor-

²⁷ Veithzal Rivai Zainal, dll, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 4

faktor produksi lainnya tersebut. Namun, perlu diingat bahwa sumber daya manusia sendiri sebagai faktor produksi lainnya, merupakan masukan (input) yang diolah oleh perusahaan dan menghasilkan keluaran (output). Karyawan baru yang belum mempunyai ketrampilan dan keahlian dilatih, sehingga menjadi karyawan yang terampil dan ahli. Apabila dia dilatih lebih lanjut serta diberikan pengalaman dan motivasi, dia akan menjadi karyawan yang matang. Pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen SDM.

Penerapan fungsi- fungsi manajemen dalam manajemen SDM dalam arti makro adalah fungsi- fungsi pokok manajemen umum, seperti fungsi manajerial, sedangkan dalam arti mikro adalah fungsi- fungsi manajemen SDM secara fungsional. Dengan demikian, SDM yang telah terkait pada suatu organisasi (formal, perusahaan, industri) berdasarkan suatu kontrak kerja, atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi berdasarkan suatu kerja sama, disebut SDM pada status mikro (SDM mikro, pegawai, karyawan , staf) dan SDM yang masih bebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerja sama dengan suatu organisasi disebut SDM makro.²⁸

Setelah suatu perusahaan mempunyai gambaran tentang hasil analisis pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan

²⁸ Veithzal Rivai Zainal, Masyur Ramly, Thoby Mutis & Willy Arafah, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*,..., hal. 17

dan tujuan perusahaan, maka tugas departemen SDM adalah mengisi jabatan dengan SDM yang cocok dan berkualitas untuk pekerjaan itu.²⁹

Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan/ dikumpulkan. Hasilnya adalah merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Selain itu rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM (karyawan) yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan.

Penciptaan kesempatan kerja yang tinggi (high employment) adalah sasaran makro ekonomi berikutnya. Sasaran ini sangat penting, karena pengangguran berdampak negatif pada kehidupan ekonomi dan sosial di masyarakat.³⁰

Ilmu Ekonomi Mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan- keputusan yang ada hubungannya dengan aspek ekonomi. Individu yang dimaksud di sini adalah tidak terbatas pada seorang konsumen., tetapi juga produsen.³¹

Apabila para pencari kerja sudah mendapatkan pekerjaan, ada hal yang perlu diperhatikan ketika pertama kali mendapatkan pekerjaan baru,

²⁹ *Ibid.*, hal. 118

³⁰ Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya ,2006), hal.

³¹ Sri Adiningsih & Kadarusman, *Ekonomi mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hal. 2

kebanyakan dalam pikiran setiap orang akan muncul berbagai pertanyaan. Apakah saya dapat mengerjakan pekerjaan ini ? atau apakah saya akan kerasan pada pekerjaan ini? Apakah boss akan menyukai saya ? hal ini mungkin wajar tetapi hal tersebut dapat membuat cemas si karyawan baru tersebut dan juga menimbulkan rasa malas pada karyawan untuk belajar. Para psikolog mengatakan bahwa kesan pertama adalah kuat dan abadi. Karena itu, untuk membantu para karyawan agar menjadi puas (tidak cemas) dan produktif, manajer dan pengembangan SDM harus membuat kesan pertama itu indah dan menyenangkan.³²

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menempatkannya secara tepat, umat Islam berkewajiban meningkatkan kualitasnya sistem pendidikan dan pelatihan serta mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam segala bidang kehidupan. Kemudian, menempatkan personal Job yang tepat dan sesuai keahlian masing- masing, sehingga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT,:

Tidak sepatutnya bagi orang- orang mukmin itu pergi semaunya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap- tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang

³² Veithzal Rivai Zainal, Masyur Ramly, Thoby Mutis & Willy Arafah, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*,(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 148

agama (tafaqquh Fiddin) dan untuk memberi peringatan kepada mereka dapat menjaga dirinya (At- Taubah: 122).³³

4. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Kebijakan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah serta, per kembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Kebijakan tersebut maka dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, Departemen Tenaga Kerja dalam UU No. 13 Tahun 2002 18 tentang Ketenagakerjaan memandang perlu untuk menyusun program yang mampu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.³⁴

Sehingga dari kesimpulan di atas bahwa tenaga tenaga kerja merupakan orang yang mampu bekerja dan bagian dari integral dalam setiap sistem produksi, apakah distranformasi secara manual atau dengan

³³ Yusuf Al- Qardhawi, *Mayarakat Berbasis Syariat Islam (II)*, (Solo: Era Intermedia, 2013), Hal. 100

³⁴ Siska Ratna Sari ,*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus Konveksi M-Yege Collection Desa Kuanyar Jepara,...*, hal. 17- 18

mesin sangat otomatis, sehingga untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional dan sesuai kebutuhan suatu perusahaan maka perlu adanya tes pada saat diadakannya perekrutmen tenaga kerja.

C. Kesejahteraan Masyarakat Atau Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.³⁵

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.³⁶

³⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 9

³⁶ Milda Rohmania, *Peran Usaha Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*, (Tulungagung: skripsi tidak diterbitkan, 2019), Diakses pada tanggal 30 April 2019 Pukul 21.35 hal. 30

Dapat di tarik kesimpulan bahwa kesejahteraan merupakan titik tolak ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam. Sedangkan Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan ukhrowi.

Adapun pendapat dari Todaro dan Stephen C. Smith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Tingkat Kehidupan Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

- c. Memperluas Skala Ekonomi dari Individu dan Bangsa Adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.³⁷

Kesejahteraan merupakan suatu tahapan dalam terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang dimana orang tersebut bisa merasa cukup dan tidak mempunyai rasa kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, kesehatan, pendidikan, dalam memenuhi semua itu diharapkan UKM dapat menjadi salah jalan untuk masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidupnya dan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera.

Sedangkan kesejahteraan masyarakat atau sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁸ Berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁹

³⁷ Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial,..., hal. 64

³⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial

³⁹ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/11TAHUN2009UU.HTM> diakses pada tanggal 27 April 2019 Pukul 19.22

2. Pengertian Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan menurut islam mencakup dua pengertian yaitu sebagai berikut :

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa. Karena kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara hidupnya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia dilanjutkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.⁴⁰

3. Indikator Kesejahteraan pada BPS (badan pusat statistik)

Berikut indikator kesejahteraan yang dijelaskan dalam BPS (badan pusat statistik) sebagai berikut:

⁴⁰ Evilya Dias Hapsari, *Strategi Kemitraan Sektor Peternakan Susu Sapi Perah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Sinar Mulya Desa Mulyasaro, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung: skripsi tidak diterbitkan, 2019), Diakses pada tanggal 30 April 2019 Pukul 21.35 hal. 4

1) Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

2) Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

4) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat

yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas.

4. Tujuan Kesejahteraan

Kesejahteraan mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti mencapai standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.⁴¹

⁴¹ Evilya Dias Hapsari, *Strategi Kemitraan Sektor Peternakan Susu Sapi Perah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Sinar Mulya Desa Mulyasaro, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)*..., hal. 45-46

5. Indikator Kesejahteraan

Menurut Kolle yang dikutip oleh Rosni pada jurnal Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, untuk melihat tingkat kesejahteraan ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran anatara lain adalah⁴²:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spritual, seperti moral, etika, keserasian, dan sebagainya

6. Pembagian pada Tingkat Kesejahteraan Tingkat kesejahteraan masyarakat

Adapun pembagian pada tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan menjadi lima jenis yaitu⁴³:

- a. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Basic Needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

⁴² Ibid,...Hlm. 46

⁴³ Medriyansah, *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Tempe Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung: skripsi tidak diterbitkan, 2017), Diakses pada tanggal 30 April 2019 Pukul 06.30, hal. 35-37

- b. Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologinya (socio psychological needs), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, rumah untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.
- c. Sejahtera II adalah keluarga-keluarga yang disamping dapat memenuhi kebutuhan dasarnya juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (Development needs) seperti kebutuhan untuk meningkatkan agama, menabung, berinteraksi dengan keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.
- d. Sejahtera III adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan, dan sebagainya.

- e. Sejahtera III + adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.³⁸ 5. Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam.⁴⁴

D. Upah

Pengertian upah menurut PP RI Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 “upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya”.⁴⁵

Perusahaan memberikan Upah kepada pekerjanya sebagai imbalan/balas jasa atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah kerja yang diberikan biasanya bergantung pada:⁴⁶

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya
2. Peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang Upah Minimum Regional (UMR)
3. Kemampuan dan Produktivitas perusahaan

⁴⁴ Wahyu Prastyaningrum, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung*, (Semarang: skripsi tidak diterbitkan, 2009), hal. 16-17

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 1.

⁴⁶ Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 237.

4. Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi
5. Perbedaan jenis pekerjaan ,kebijakan komponen gaji/upah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan upah minimum yaitu:⁴⁷

1. Tingkat biaya hidup (pekerja)
2. Tingkat kebutuhan hidup minimum
3. Kemampuan perusahaan
4. Keadaan ekonomi daerah dan nasional
5. Perluasan lapangan pekerjaan

E. Industri Dan Konveksi

1. Pengertian Industri

Pengertian dari Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁸ Menurut Badan Pusat Statistik industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi, atau barang antara untuk diolah kembali menjadi barang jadi atau barang yang memiliki nilai kegunaan yang lebih tinggi.

⁴⁷ Djoko Triyanto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 131-132

⁴⁸ Sayidatul Hikmah, *Pengaruh Modal Usaha Dan Tenaga Kerja Terhadap Hasil Produksi Batu Bata Merah Di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung: skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal.20

Menurut sumber Badan Pusat Statistik (BPS) perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.⁴⁹

1. Industri Pengolahan

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling).

Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu⁵⁰:

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>, diakses pada tanggal 30 April 2019 pukul 22.18

⁵⁰ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>, diakses pada tanggal 30 April 2019 pukul 22.18

2. Jasa industri

Jasa industri adalah suatu kegiatan industri yang melayani keperluan dari pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Industri Kecil adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 5-19 orang. Sedangkan Industri Mikro adalah suatu perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 1-4 orang. Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.⁵¹

Pengertian Konveksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah perusahaan pakaian. Menurut Sri Wening dan Sicilia Savitri konveksi adalah usaha di bidang busana jadi yang dibuat secara besar-

⁵¹ Badan Pusat Statistik Nasional, (<https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>) diakses pada tanggal 15 April 2019 Pukul 09.00 WIB

besaran. Jadi, konveksi adalah perusahaan pakaian jadi yang dibuat secara besar-besaran. Jadi, dimana barang yang diproduksi dibuat berdasarkan ukuran standar S, M, L, dan XL dalam jumlah yang banyak. Busana jadi atau *ready-to-wear* (bahasa Inggris) dan *Pret-a-porter* (bahasa Perancis), tidak diukur menurut pemesan, melainkan menggunakan ukuran standar atau ukuran yang telah dibakukan.⁵²

F. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Dalam peraturan yang ada di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.⁵³

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.

⁵² Erny Lindhawati, *Pengelolaan Usaha Konveksi Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*, (Yogyakarta: skripsi tidak diterbitkan, 2008), hal. 76

⁵³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 2012), hal. 11

- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.⁵⁴

Peran usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Dimana untuk kedepannya pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Perlu diketahui mengenai pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Disamping itu usaha mikro kecil dan menengah juga dapat menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap product Domestic Bruto (PDB). Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam

⁵⁴ Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. Pengertian UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau suatu badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.⁵⁵

2. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal sering perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang

⁵⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal 11.

baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:⁵⁶

1. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

⁵⁶ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT Dwi Candra Wacana, 2010) hal. 32.

7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard an harus transparan.

Dari karakteristik tersebut menyiratkan bahwa adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensional terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.⁵⁷

3. Peluang Bisnis UMKM

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa peran penting UMKM:

- a) UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
- b) UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal nnpenciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

⁵⁷ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro* ,... hal. 33.

- c) UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi *link* bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
- d) UMKM di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.⁵⁸

4. Kendala Bisnis UMKM

Data-data yang disebutkan sebelumnya telah membuktikan begitu besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, meskipun demikian bisnis UMKM tidak selalu berjalan mulus, masih banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM.

Berikut ini beberapa kendala hambatan yang sering muncul dalam UMKM:

⁵⁸ Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk), kerjasama dengan LPPI tahun 2015, hal. 17-20

a. Internal

1. Modal. Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan dari perbankan. Hambatannya dari segi geografis sehingga belum banyak perbankan yang mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.
2. Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan dengan cara menjalankan *quality control* terhadap produk.
3. Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar. Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana *mouth to mouth marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut). Belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran.
4. Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji. Karena pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, sehingga kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya.
5. Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan

6. Akuntabilitas

Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

b. Eksternal⁵⁹

1. Iklim usaha masih belum kondusif.

Koordinasi antar *stakeholder* UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.

Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.

2. Infrastruktur

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dan dengan alat-alat teknologi. Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

3. Akses

Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah. Akses

⁵⁹ Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk), kerjasama dengan LPPI tahun 2015, hal. 17-20

terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu.

Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibas dengan perusahaan yang bermodal lebih besar.

4. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
 - b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
 - c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja.
 - d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
 - e. Terdapatnya dinamisme manajemen dan peran kewirausahaan.⁶⁰

5. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro

Pada usaha mikro kecil dan menengah khususnya industri koveksi memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:⁶¹

⁶⁰ Tiktik Sartika Partomo & Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13.

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor : Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya :

⁶¹ Medriyansah, *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usahat Tempe Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,...*, hal.25

1. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
2. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
3. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil
4. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

Sedangkan untuk Faktor eksternal, yakni pada masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.⁶²

Dari kedua faktor tersebut memiliki kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit.

⁶² Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh), kerjasama dengan LPPI tahun 2015, hal. 17-20

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini diantaranya :

1. Fakhurrozi⁶³, *“Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Pembuatan Tahu Tempe Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat”* Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembuatan Tahu Tempe terhadap penyerapan tenaga kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kel. Semanan Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan : dalam penelitian tersebut persamaannya terdapat pada jenis penlitian yang digunakan Metode yang digunakan yakni dengan pengumpulan data kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara yakni dengan melakukan observasi, wawancara dan didukung dengan dokumentasi. Dana sama- sama melakukan penelitian pada usaha mikro kecil dan menengah. Perbedaan : perbedaannya terletak pada obyeknya yang mana dalam penelitian Fakhurrozi meneliti obyek pembuatan tahu tempe , sedangkan penelitian saya menggunakan obyek konveksi.

⁶³ Fakhurrozi, *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Pembuatan Tahu Tempe Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat*, Sripsi (Jakarta: skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal: 53

2. Haryati,⁶⁴ “Pengembangan Ekonomi Lokal Yang Berorientasi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur” metode yang digunakan Dalam penelitian terdahulu ini yakni deskriptif, dalam penelitian ini fokus penelitiannya yakni pada tujuan pengembangan ekonomi lokal yang berpotensi pada penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur. perbedaan: metode yang dilakukan Haryati selaku penulis yakni dengan pengumpulan data merupakan tahapan penting yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan kerja keras dari peneliti. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkam dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yakni: studi kebijakan publik, studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Persamaan dengan yang penulis lakukan yaitu sama- sama membahas mengenai penyerapan tenaga kerja,

3. Syuhada, Tasman dan Hardiani,⁶⁵ “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi”, Metode yang dipakai menggunakan metode analisis data sekunder yaitu data primer yang telah diolah pihak lain dan disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram dengan jenis data runtun waktu (time series) selama kurun waktu tahun 1993 sampai 2010.

Perbedaan : perbedaan yang peneliti lakukan terletak pada cara teknik

⁶⁴ Eny Haryati, *Pengembangan Ekonomi Lokal Yang Berorientasi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur*, (2010), Vol.14 No. 2, (ISSN 1411-0393), hal. 245-269

⁶⁵ Siti Syuhada, Aulia Tasman, Hardiani, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi*, (2014), Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No. 2, hal. 93- 99

pengumpulan data melakukan studi dokumentasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada UMKM di kota Jambi, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif yang dan diterangkan secara deskriptif, persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama- sama membahas penyerapan tenaga kerja dalam UMKM.

4. Wenagama,⁶⁶ “Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung”, Sampel penelitian ditentukan dengan mempergunakan *simple random sampling* dengan menggunakan rumus *Frank Lynnnch*, persamaan yang dilakukan dengan penulis yakni pada eknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif komporatif. Sama- sama meneliti mengenai penyerapan tenaga kerja pada UMKM. perbedaanya pada teknik pengumpulan datanya yang berbeda.
5. Ratna,⁶⁷ “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus Konveksi M-Yege Collection Desa Kuanyar Jepara)”. Persamaanya terdapat pada peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan yang dilakukan penelitian terdahulu yaitu dengan mencari data,mewawancarai masyarakat secara langsung

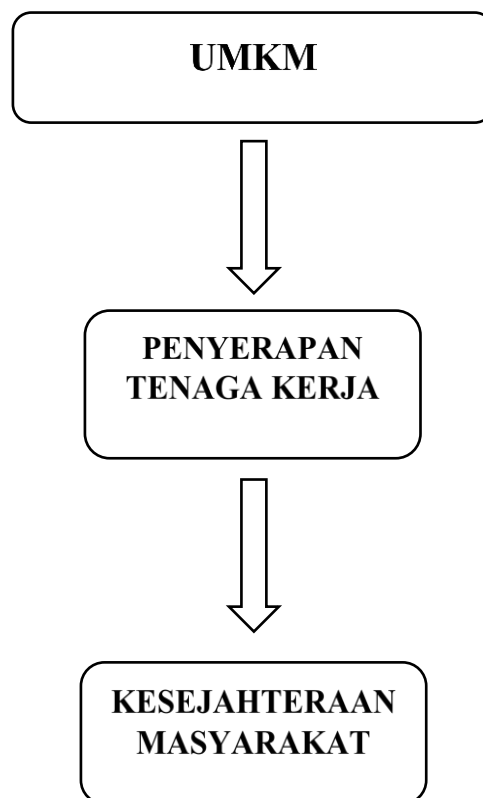
⁶⁶ I Wayan Wenagama, *Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, (2013), Buletin Studi Ekonomi Vol. 18 No. 01, hal. 78- 84

⁶⁷ Siska Ratna Sari ,*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus Konveksi M-Yege Collection Desa Kuanyar Jepara)*, (Kudus: skripsi tidak diterbitkan, 2016, hal. 55

dan penulis juga akan melakukan pendekatan yang sama serta dokumentasi, sama- sama meneliti mengenai konveksi. Tidak ada perbedaan yang signifikan dengan yang penulis lakukan hanya studi kasus pada konveksi besar dan peneliti lakukan pada konveksi sedang.

H. Kerangka Berfikir Teoritis

Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Industri Konveksi Kecil Dan Menengah Di Tulungagung. Kerangka pemikirannya sebagai berikut :



Peran Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini begitu penting dalam memajukan perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UMKM

tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apabila, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Dan saat ini banyak jenis usaha yang telah tercipta dari adanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salah satunya yakni dari industri konveksi yang banyak tersebar di kota Tulungagung, khususnya yang paling banyak ada di desa Sobontoro.

Dengan adanya UMKM saat ini khususnya industri konveksi yang ada di desa Sobontoro, untuk membantu kelangsungan usaha tersebut semakin berkembang, para pemilik tentunya tidak hanya mengandalkan tenaga mereka sendiri namun akan mencari banyak tenaga pekerja. UMKM sendiri tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat sekitar usaha, dan dampak adanya industri konveksi kecil dan menengah di sekitar lingkungan masyarakat desa ini, para pemilik tentunya akan lebih fokus menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar lingkungannya yang notabennya mereka masih banyak yang menganggur dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Diharapkan dengan pengoptimalisasian dalam penyerapan tenaga kerja pada industri konveksi usaha mikro kecil dan menengah akan berdampak baik bagi masyarakat sekitar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kesejahteraan masyarakat yang di harapkan oleh pemerintah dapat tercapai lebih maksimal dan tepat sasaran.